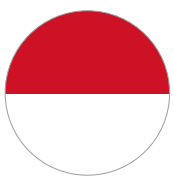




Fisheries
Transparency
Initiative

TAKING STOCK

Transparansi daring tata
kelola perikanan



Republik
Indonesia

Bekerja sama dengan:



INDONESIA
OCEAN JUSTICE
INITIATIVE

2024 Ringkasan

© **2025 Fisheries Transparency Initiative.** Hak cipta dilindungi undang-undang.

Penyusun: Dr. Andre Standing (Fisheries Transparency Initiative), Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI)

Design: weeks.de Werbeagentur GmbH



Kajian '*TAKING STOCK: Transparansi Daring Tata Kelola Perikanan*' untuk Republik Indonesia (2024) ini didanai oleh Gordon and Betty Moore Foundation.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk melakukan verifikasi terhadap kesesuaian dari informasi yang terkandung pada kajian ini. Semua informasi dianggap sesuai berdasarkan verifikasi di bulan November 2024. Fisheries Transparency Initiative (FiTI) tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas berbagai konsekuensi yang dihasilkan dari penggunaan kajian ini oleh orang lain.

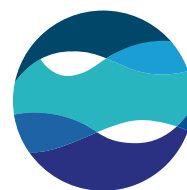
Dalam melakukan kajian ini, FiTI tidak melakukan investigasi terhadap kelengkapan dan akurasi dari informasi yang dipublikasikan oleh pemerintah, sehingga tidak menilai integritas dari informasi yang ditemukan.

Hasil dari kajian ini tidak mewakili pandangan FiTI terhadap kerangka hukum dari negara yang dikaji, kewilayahan perairannya, dan penetapan batas wilayah perairannya.

Kami berterima kasih atas kontribusi semua individu dan organisasi pada berbagai tahap riset dan penyusunan kajian ini.

Fisheries Transparency Initiative (FiTI) adalah inisiatif global yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan yang mendorong transparansi dan kolaborasi pada pengelolaan perikanan.

Dengan membuat pengelolaan perikanan menjadi lebih transparan dan inklusif, FiTI mendorong diskusi publik yang partisipatif mengenai kebijakan perikanan dan mendukung kontribusi jangka panjang dari sektor perikanan terhadap ekonomi nasional, serta kehidupan masyarakat dan keberlangsungan bisnis yang bergantung pada lingkungan hidup kelautan yang sehat.



Fisheries
Transparency
Initiative

fiti.global

TAKING STOCK: *Transparansi secara Daring dalam Pengelolaan Perikanan* Laporan ini mengkaji ketersediaan informasi mengenai sektor perikanan yang dipublikasikan pada situs web pemerintah Indonesia.



DAFTAR ISI

PERIKANAN BERKELANJUTAN MEMBUTUHKAN TRANSPARANSI	04
MENGENAI KAJIAN INI	07

KONTEKS MENGENAI PERIKANAN DI INDONESIA	10
TEMUAN UTAMA	13
AKSES PUBLIK TERHADAP INFORMASI PERIKANAN	13
MEMBERIKAN MAKNA PADA TRANSPARANSI: BEBERAPA CONTOH PENTING	16
PENELUSURAN LEBIH MENGENAI AKSES INFORMASI PERIKANAN	19
APAKAH TERSEDIA SECARA DARING?	20
APAKAH INFORMASI MUTAKHIR?	24
APAKAH INFORMASI MUDAH DITEMUKAN?	25
REKOMENDASI UNTUK PEMERINTAH INDONESIA	27

TRANSPARANSI MEMBUTUHKAN KEPERCAYAAN	29
EVALUASI PRAKTIK KETERBUKAAN INFORMASI OLEH PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENGELOLAAN PERIKANAN LAUT	30

Laporan ini terdiri dari Ringkasan Laporan dan Laporan Lengkap
Dua laporan tersebut, termasuk metodologi kajian, dapat ditemukan di fiti.global/taking-stock



PERIKANAN BERKELANJUTAN MEMBUTUHKAN TRANSPARANSI

Selama ribuan tahun, nelayan yang menangkap ikan untuk makanan, penghasilan, atau rekreasi tidak terlalu memikirkan cara mengelola perikanan secara berkelanjutan. Dulu, stok ikan bisa pulih dengan sendirinya dengan mudah. **Namun, sekarang, keadaannya telah berubah.** Laut dihadapi oleh berbagai ancaman yang meningkat, termasuk dari perubahan iklim, pencemaran, dan penangkapan ikan secara berlebihan.

Pemerintah memiliki kewajiban yang sangat penting untuk mengelola sumber daya yang kita miliki bersama, termasuk sumber daya perikanan, atas nama warga negaranya. Hal ini menimbulkan tantangan, yaitu: memastikan penangkapan dan perdagangan perikanan berkontribusi pada pendapatan, ketenagakerjaan, pangan, dan nutrisi untuk jutaan orang, di saat bersamaan juga melakukan konservasi keanekaragaman hayati laut untuk generasi sekarang dan masa depan.

Ketersediaan informasi secara publik sangat penting untuk memastikan perikanan yang berkelanjutan. Namun, transparansi perikanan masih belum menjadi prioritas. Banyak negara tidak membuka informasi dasar mengenai sektor perikanan, seperti kerangka hukum, perizinan, perjanjian perikanan, hasil kajian stok ikan, kontribusi keuangan, data penangkapan ikan, dan subsidi perikanan. Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa pelaku usaha perikanan tidak melakukan pelaporan yang akurat kepada pemerintah mengenai informasi hasil tangkapnya, praktik perikananannya, dan kewajiban pembayarannya kepada negara. Data yang sudah terpublikasi seringkali tidak lengkap, tidak mutakhir, tidak terverifikasi, atau tidak dapat diakses dengan mudah.



Kurangnya transparansi dasar dapat mendorong hal-hal negatif pada sektor perikanan secara global, seperti praktik penangkapan ikan secara ilegal, jumlah kapal penangkapan ikan yang melebihi kapasitas, penangkapan ikan secara ilegal, subsidi yang dapat mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan, korupsi, kebijakan tata kelola perikanan yang tidak mendukung tujuan keberlanjutan, dan lain-lain. Sektor yang lebih transparan dapat menarik perhatian publik saat hal-hal tersebut terjadi, maka membuat pelaku menjadi sulit untuk menyembunyikan aksinya dan dapat mendorong aksi untuk perbaikan-perbaikan.

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
The State of World Fisheries and Aquaculture 2010



Transparansi tidak bersifat sukarela. Transparansi adalah kewajiban negara dan hak warga negara!

Ketentuan mengenai informasi yang dapat diakses, mutakhir, dan akurat pada sektor perikanan semakin banyak diakui sebagai **kewajiban hukum bagi pemerintah**, yang berangkat dari, salah satunya, hukum mengenai hak atas informasi. Hukum tersebut biasanya terdiri dari tiga prinsip: partisipasi publik, akses keadilan, dan akses informasi. Artinya, masyarakat perlu diberikan akses terhadap informasi mengenai lingkungan hidup, termasuk sektor perikanan, dengan pengecualian yang terbatas dan dapat dijustifikasi oleh kepentingan kerahasiaan dan keamanan.



- Sampai hari ini (April 2024), Pemerintah Indonesia belum berkomitmen untuk bergabung atau mendukung **Fisheries Transparency Initiative (FiTI)**,
- Sejak 2011, Indonesia sudah menjadi anggota dari **Open Government Partnership (OGP)**
- Indonesia juga merupakan negara pelaksana dari **Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)**, yang diakui sebagai standar global untuk tata kelola sumber daya minyak bumi, gas, dan mineral yang baik.

Selama beberapa dekade, Indonesia sudah memperlihatkan komitmen kuat untuk meningkatkan transparansi dan melakukan digitalisasi informasi dan layanan publik. Sebagai anggota aktif dari Open Government Partnership sejak 2011, Indonesia sedang melaksanakan rekomendasi kebijakan ketujuh, dengan berkolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil.

Inisiatif penting dari upaya keterbukaan informasi oleh Indonesia adalah program 'Satu Data', yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019. Inisiatif ini memandatkan harmonisasi data yang tersebar di beberapa kementerian dan lembaga untuk memastikan informasi akurat, mutakhir, terintegrasi, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses, dan dapat disebar.

Sejalan dengan komitmen di atas, Indonesia memiliki Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sejak tahun 2008, yang didukung oleh beberapa peraturan pelaksana, termasuk Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan pada kerangka hukum yang ada dilakukan oleh Komisi Informasi Publik (KIP), sebuah lembaga independen yang bertanggungjawab untuk memonitor pelaksanaan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik dan menyelesaikan konflik yang timbul antara pencari informasi dengan pemerintah.



Pentingnya akses informasi juga ditekankan oleh UN Sustainable Development Goals (SDGs). Target 16.10 dari SDGs meminta negara-negara untuk mengadopsi legislasi atau kebijakan yang dapat memastikan hak atas informasi, sebagai bagian yang sangat penting untuk pemenuhan Target 16, namun juga dapat mendukung pemenuhan target SDGs lainnya.

MENGENAI KAJIAN INI

Kajian ini merupakan kajian pertama yang dilakukan oleh FiTI di Indonesia mengenai transparansi secara daring di sektor perikanan.

Kajian TAKING STOCK ini mencakup 12 aspek tata kelola perikanan, yang mengacu pada FiTI Standard.²

FiTI Standard merupakan satu-satunya kerangka yang diakui secara internasional yang mendefinisikan jenis-jenis informasi di sektor perikanan yang perlu dipublikasikan secara daring oleh pemerintah. FiTI Standard disusun selama dua tahun melalui kolaborasi berbagai pemangku kepentingan secara global. Tujuannya adalah untuk berkontribusi pada keberlanjutan sektor perikanan dengan meningkatkan akses dan kredibilitas dari tata kelola informasi di sektor perikanan.

- | | | | | | |
|----|---|--|-----|--|-----------------------------------|
| #1 |  | Peraturan perundang-undangan dan dokumen kebijakan resmi | #7 |  | Sektor pengolahan dan perdagangan |
| #2 |  | Pengelolaan tenurial perikanan | #8 |  | Penegakan hukum |
| #3 |  | Perjanjian akses penangkapan ikan oleh asing | #9 |  | Standar ketenagakerjaan |
| #4 |  | Kondisi sumber daya perikanan | #10 |  | Subsidi perikanan |
| #5 |  | Perikanan skala besar | #11 |  | Bantuan resmi untuk pembangunan |
| #6 |  | Perikanan skala kecil | #12 |  | Kepemilikan manfaat |

Untuk kajian ini, 12 aspek di atas dibagi menjadi **39 elemen transparansi**.³

² <https://fiti.global/fiti-standard>

³ Penjelasan mengenai 39 elemen transparansi dapat ditemukan di bagian '*Temuan Utama*'.

Kajian ini mengevaluasi informasi dasar mengenai sektor perikanan di Indonesia yang tersedia tanpa pungutan di situs web pemerintah, dan mengkaji apakah informasi mutakhir dan mudah untuk ditemukan.⁴



Selain itu, kajian ini:

- Melihat apakah informasi yang dipublikasikan mudah untuk **digunakan**, misalnya untuk menggunakan fitur unduh (download), cari (find), atau saring (filter);
- Mencari '**praktik transparansi yang baik**', dimana informasi yang dipublikasikan memungkinkan pengguna yang bukan ahli dapat dengan mudah menarik kesimpulan dari informasi yang ada⁵; dan
- Memberikan **rekomendasi** praktis untuk meningkatkan transparansi daring di sektor perikanan Indonesia.



Republik
Indonesia

Kajian ini bertujuan untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam melakukan meningkatkan transparansi pada tata kelola perikanan dan mendorong ketertarikan dan perhatian publik yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan terhadap sektor perikanan.

Kajian ini juga bertujuan untuk membentuk tolak ukur untuk melakukan evaluasi dari waktu ke waktu.

4 Informasi lebih lanjut mengenai metodologi kajian dapat ditemukan di <https://www.fiti.global/taking-stock/methodology>.

5 Sebagai contoh, pemerintah dapat menggunakan teknis yang inovatif untuk membuat informasi menjadi lebih visual, seperti melalui sistem informasi daring atau fact sheets.



Keterbukaan informasi tidak dapat secara langsung dihubungkan dengan progres pada tata kelola perikanan yang berkelanjutan.

Kurangnya transparansi perikanan tidak selalu terjadi karena disengaja. Pemerintah dengan tingkat transparansi yang rendah seringkali dipandang secara negatif, karena seakan-akan secara sengaja menutupi informasi dari pengamatan/pengawasan publik. Namun, seringkali kurangnya transparansi terjadi karena dari faktor lain, seperti kompleksitas dari sektor perikanan, teknologi yang kurang memadai, ketersediaan sumber daya manusia dan keahlian, atau faktor hukum. Kementerian atau lembaga di beberapa negara, khususnya yang mendapatkan pendanaan yang optimal, tidak menempatkan transparansi sebagai prioritas. Sayangnya, argumen ini dapat juga dijadikan alasan untuk tidak menjalankan transparansi karena menghindari pengawasan publik.

Tingkat transparansi yang rendah pada kajian ini mungkin bukan sebuah indikasi pelanggaran, namun menekankan pada peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan keterbukaan informasi kepada pemangku kepentingan lain. Sementara itu, tingkat transparansi yang tinggi mengindikasikan sistem keterbukaan yang kuat, namun mungkin tidak secara langsung merefleksikan keberhasilan dalam pengelolaan perikanan secara berkelanjutan.

Transparansi juga tidak dapat diinterpretasikan sebagai indikator langsung dari sifat kejujuran dan integritas.

Sehingga, kajian ini tidak digunakan untuk mengambil kesimpulan akhir untuk mengkaji pengelolaan perikanan secara luas. Kajian ini bertujuan untuk mengukur praktik keterbukaan di negara berdasarkan kerangka transparansi yang diakui secara internasional, yaitu FITI Standard, dan mendorong diskusi antar pemangku kepentingan di sektor perikanan di Indonesia.

Ambisi dari kajian ini dan kajian lanjutan lainnya adalah untuk berkontribusi pada upaya menjadikan transparansi sebagai norma secara global di sektor perikanan.

KONTEKS MENGENAI PERIKANAN DI INDONESIA



Perkembangan terkini mengenai sektor perikanan di Indonesia:



Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk melakukan transformasi tata kelola perikanan dengan mengimplementasikan kuota individu, sebagai bagian dari kebijakan Penangkapan Ikan Terukur. Namun, kekhawatiran publik akan potensi dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan ini membuat implementasinya diundur oleh pemerintah hingga 2025.



Pemerintah Indonesia telah meluncurkan kebijakan nasional untuk memberikan kartu identifikasi bagi setiap pelaku usaha perikanan, terutama nelayan kecil. Hal ini bertujuan untuk memastikan semua memiliki akses terhadap fasilitas dari pemerintah, termasuk subsidi untuk nelayan kecil.



Pada tahun 2024, Indonesia menjadi negara pertama untuk meluncurkan 'coral bond' melalui kolaborasi dengan Bank Dunia. Pendapatan dari instrumen finansial ini digunakan untuk konservasi terumbu karang dan memperluas konservasi perairan. Selain itu, Indonesia dan Amerika Serikat menyepakati pengalihan utang sebesar 35 juta dolar untuk dijadikan peningkatan pendanaan konservasi terumbu karang.



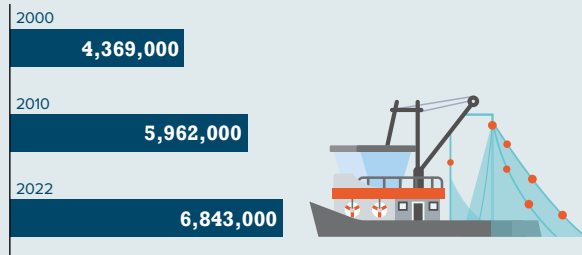
Sektor perikanan di Indonesia memegang peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi, ketenagakerjaan, ketahanan pangan, dan gizi masyarakat.⁶

Republik Indonesia



Produksi perikanan tangkap

(ton, berat hidup)

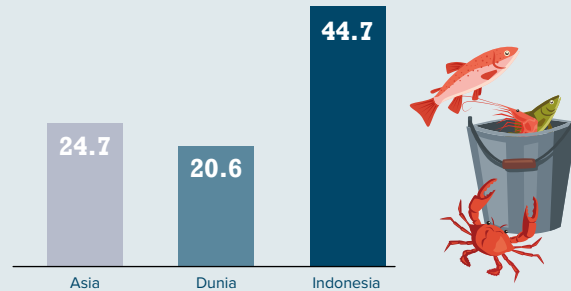


Indonesia merupakan negara perikanan terbesar kedua di dunia (berdasarkan volume tangkapan).

Sumber: FAO The State of World Fisheries and Aquaculture 2024

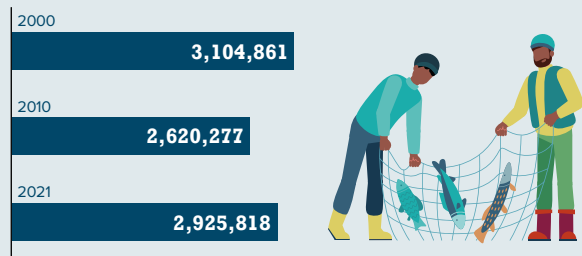
Ikan yang tersedia untuk dikonsumsi

kg/per kapita



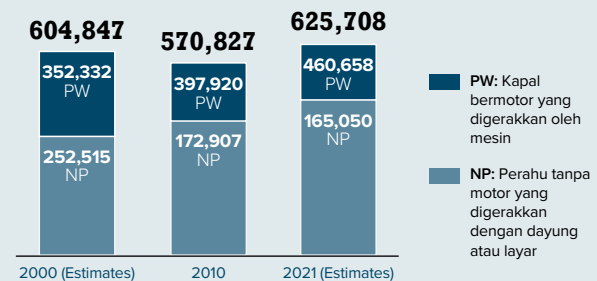
Sumber: FAO State of World Fisheries and Aquaculture 2020, FAO GLOBEFISH Market Profile – Indonesia 2020

Jumlah nelayan



Sumber: FAO Fishery and Aquaculture Statistics Yearbook 2021 (dipublikasikan pada 2024)

Jumlah kapal perikanan



Sumber: FAO Fishery and Aquaculture Statistics Yearbook 2021 (dipublikasikan pada 2024)

5 Spesies Terbanyak



Sumber: FAO GLOBEFISH Market Profile – Indonesia 2020 (dalam ton, berdasarkan volume produksi)

Ekspor ikan dan produk perikanan

Indonesia merupakan eksportir komoditas perikanan terbesar ke-13.

Dollar AS
4,832,370,690
[2023]



Sumber: FAO GLOBEFISH Market Profile – Indonesia 2020

⁶ Informasi ini mencerminkan statistik internasional (misalnya dari FAO PBB), yang dalam beberapa kasus mungkin berbeda dari statistik nasional. Selain itu, kajian ini tidak menyebutkan kontribusi sektor perikanan Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Meskipun ini merupakan cara umum untuk mengungkapkan nilai ekonomi perikanan, PDB tidak cukup untuk sepenuhnya mewakili keseluruhan biaya dan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan dari sektor tersebut.

Indonesia menempati peringkat kedua di dunia dalam produksi ikan tahunan dari perikanan tangkap. Menurut statistik pemerintah, pada tahun 2023, total produksi dari sektor perikanan laut yang dilakukan komersial adalah 7,7 juta ton. Sekitar satu juta kapal penangkap ikan beroperasi di perairan Indonesia, yang sebagian besar merupakan kapal penangkap ikan skala kecil. Tidak seperti banyak negara Asia lainnya, Indonesia tidak mengizinkan kapal berbendera asing beroperasi di perairannya.

Pengelolaan perikanan di Indonesia sangat kompleks dan tengah mengalami transformasi yang substansial. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki tanggung jawab atas pengelolaan perikanan. Namun, perairan laut Indonesia terbagi dalam 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan, yang masing-masing memiliki Dewan Pengelolaan Perikanan dengan perwakilan dari pemerintah provinsi. Indonesia juga telah bergerak menuju pengelolaan berbasis masyarakat, sementara di banyak wilayah pesisir, perikanan lokal diatur melalui hukum adat. Pemerintah mengadopsi pendekatan baru untuk mengelola hak penangkapan ikan, yang dikenal sebagai Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur, yang akan membuat perikanan laut Indonesia bergerak menuju sistem berbasis kuota individu. Kekhawatiran atas dampaknya terhadap mata pencaharian nelayan skala kecil, serta potensi memungkinkan konsentrasi ekonomi di sektor tersebut, telah menunda kebijakan tersebut. Namun, kebijakan ini diharapkan mulai beroperasi pada tahun 2025.

KKP telah menanggapi isu transparansi dalam pengelolaan perikanan dengan serius. Hal ini sejalan dengan pencapaian negara dalam bergerak menuju pemerintahan terbuka, termasuk peluncuran inisiatif Satu Data pada tahun 2019, yang mengintegrasikan sebagian besar data dan layanan pemerintah ke dalam platform pemerintah daring yang terpusat. Pada tahun 2017, KKP dipilih sebagai salah satu dari 7 kementerian pemerintah yang menjadi perintis program Satu Data. Oleh karena itu, informasi yang diterbitkan oleh KKP tentang pengelolaan perikanan sangat penting, dan secara umum, informasi ini secara berkala diperbarui. KKP menerbitkan laporan tahunan terperinci dengan data perikanan dan publikasi oleh Kementerian dan sub-unitnya yang menetapkan tujuan dan sasaran kebijakan, termasuk informasi tentang bagaimana hal tersebut dicapai.

Sebagai bagian dari inisiatif Satu Data, KKP juga telah membuat dasbor statistik lengkap yang menyajikan data pada peta Indonesia yang menunjukkan 11 wilayah pengelolaan perikanan utama, yaitu: <https://portaldata.kkp.go.id>. Dasbor ini berisi sebagian besar data sosial dan ekonomi untuk sektor perikanan yang dapat diunduh dalam format yang dapat dibaca perangkat elektronik. Namun, baru-baru ini, dasbor utama informasi perikanan telah diubah, sehingga mengakses berbagai halaman web yang berisi data statistik menjadi cukup rumit. Akibatnya, masyarakat mungkin kesulitan untuk menemukan informasi tertentu.

Meskipun desain dasbor statistik cukup membingungkan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tetap menjadi contoh utama dalam menerapkan transparansi dalam pengelolaan perikanan. Namun, masih ada beberapa aspek yang kurang transparan. Peralihan ke sistem berbasis kuota memerlukan perubahan besar dalam data pemerintah agar masyarakat dapat memahami bagaimana kuota ditetapkan dan dialokasikan. Hal ini mencakup peningkatan akses publik terhadap hasil kajian ilmiah tentang stok ikan serta publikasi informasi kepemilikan kuota penangkapan ikan.

Perjanjian kerja sama yang ditandatangani antara Indonesia dan Tiongkok baru-baru ini membuka peluang investasi yang lebih besar dari Tiongkok di sektor perikanan. Hal ini membuat kebijakan Penangkapan Ikan Terukur menjadi sorotan publik, terutama terkait potensi beroperasinya perusahaan Tiongkok di industri perikanan Indonesia.

Meningkatkan transparansi dalam sektor perikanan laut Indonesia menjadi semakin penting dalam konteks rencana kerja prioritas nasional yang akan dijalankan oleh Presiden baru, Prabowo Subianto. Salah satu pilar utama dalam strategi perencanaan ini adalah memperkuat ketahanan pangan, yang berfokus pada sektor pertanian dan perkebunan. Oleh karena itu, meningkatkan keterbukaan dan akurasi data perikanan dapat berperan penting dalam memastikan sektor pangan laut Indonesia menjadi bagian dari upaya ketahanan pangan nasional.

TEMUAN UTAMA

AKSES PUBLIK TERHADAP INFORMASI PERIKANAN



Penilaian kami menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia menganggap pengumpulan dan publikasi informasi daring tentang sektor perikanan sebagai aspek penting dari pengelolaan perikanan. Namun, terdapat beberapa informasi penting yang tidak dapat diakses publik. Selain itu kompleksitas sektor perikanan di Indonesia juga dapat mempersulit pencarian informasi.

Republik Indonesia

TEMUAN UTAMA
AKSES PUBLIK TERHADAP
INFORMASI PERIKANAN



Dari **32** elemen transparansi yang berlaku, pemerintah Indonesia telah mempublikasikan informasi secara daring untuk **24** elemen ("Akses Publik"), meskipun dengan kualitas yang beragam.



Untuk **7** elemen transparansi, tidak ada informasi yang dipublikasikan.



Untuk **1** aspek transparansi, pemerintah Indonesia belum menghasilkan informasi apa pun.

Tidak diproduksi

Informasi untuk 1 elemen transparansi belum terkumpul atau disusun.

Akses publik yang kuat

Informasi mengenai 14 elemen transparansi tersedia secara daring, terkini, dan mudah ditemukan.

Tidak ada akses publik

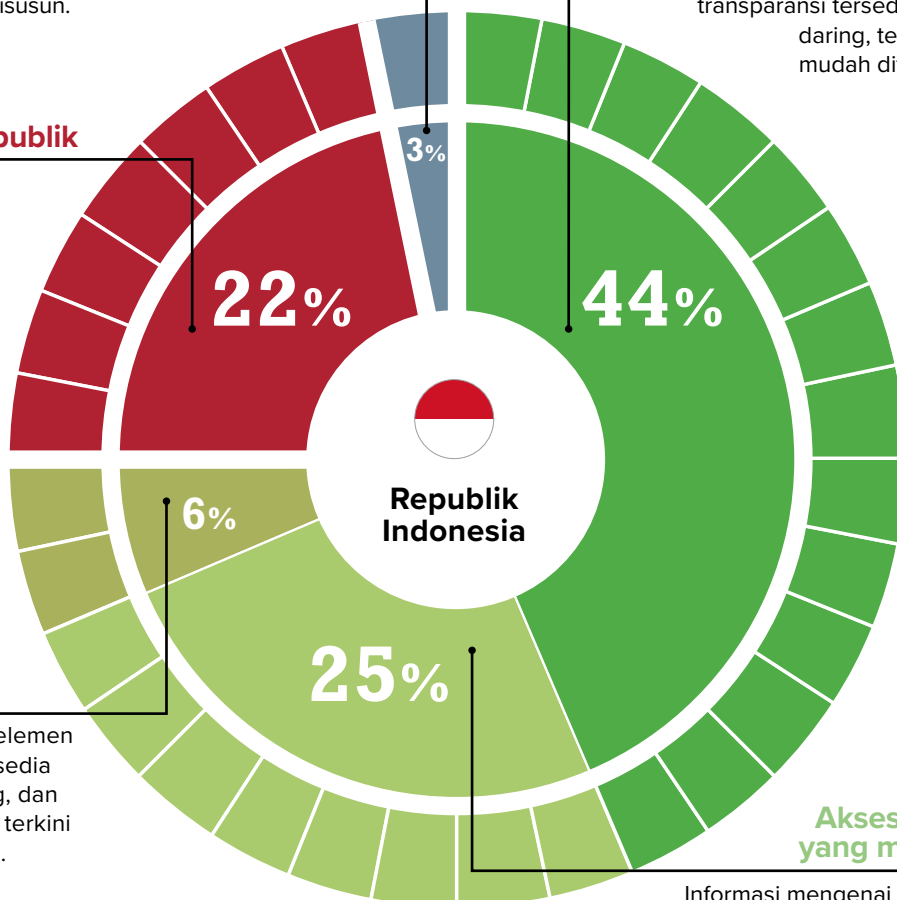
Untuk 7 elemen transparansi, tidak ada informasi yang dipublikasikan secara daring, meskipun ada indikasi bahwa informasi ini tersedia.

Akses publik yang lemah

Informasi mengenai 2 elemen transparansi hanya tersedia sebagian secara daring, dan juga tidak sepenuhnya terkini atau mudah ditemukan.










Akses publik yang moderat

Informasi mengenai 8 elemen transparansi sebagian besar tersedia secara daring, namun hanya sebagian yang terkini atau mudah ditemukan



7 dari 39 elemen transparansi dianggap tidak berlaku untuk sektor perikanan laut Indonesia (lihat [Lampiran](#)).











RINGKASAN TERPERINCI

Area tematik	ID	Elemen transparansi	  			
			APAKAH TERSEDIA SECARA DARING?	APAKAH INFORMASI TERKINI DAN MUTAKHIR?	APAKAH MUDAH DITEMUKAN?	
 #1 Peraturan Perundang-undangan dan Dokumen Kebijakan Resmi	1-A	Undang-undang tentang perikanan	✓	✓	✓	Akses publik yang kuat
	1-B	Dokumen kebijakan perikanan	✓	✓	✗	Akses publik yang moderat
	1-C	Rencana pengelolaan perikanan	✓	✓	✗	Akses publik yang moderat
 #2 Pengelolaan Tenurial Perikanan	2-A	Penangkapan ikan komersial (skala besar dan skala kecil)	✓	✓	✓	Akses publik yang kuat
	2-B	Penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup di pesisir	—	—	—	Tidak berlaku
	2-C	Penangkapan ikan untuk kegiatan ilmiah dan eksplorasi	✓	✓	✓	Akses publik yang kuat
	2-D	Penangkapan ikan untuk rekreasi	✓	✓	✓	Akses publik yang kuat
 #3 Perjanjian Akses Penangkapan Ikan oleh Asing	3-A	Kapal berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia	—	—	—	Tidak berlaku
	3-B	Kapal berbendera Indonesia yang menangkap ikan di perairan asing	—	—	—	Tidak berlaku
 #4 Kondisi Sumber Daya Perikanan	4-A	Laporan nasional tentang kondisi stok ikan	✓	✓	✓	Akses publik yang moderat
	4-B	Kajian stok ikan berbasis ilmiah	✓	✗	✗	Akses publik yang lemah
 #5 Perikanan Skala Besar	5-A	Kapal	✓	✓	✓	Akses publik yang kuat
	5-B	Pembayaran	✓	✓	✓	Akses publik yang moderat
	5-C	Hasil tangkapan di perairan Indonesia	✓	✓	✓	Akses publik yang moderat
	5-D	Hasil tangkapan di luar perairan Indonesia	✗	✗	✗	Tidak ada akses publik
	5-E	Pendaratan di pelabuhan Indonesia	✓	✓	✓	Akses publik yang kuat
	5-F	Transshipment (alih muat di laut) dan pendaratan di pelabuhan asing	✗	—	—	Tidak ada akses publik
	5-G	Hasil tangkapan buangan	✗	—	—	Tidak ada akses publik
	5-H	Upaya penangkapan ikan	✓	✗	✓	Akses publik yang lemah

 Sepenuhnya
  Sebagian besar
  Terbatas
  Tidak ada
  Tidak diproduksi
  Tidak berlaku



RINGKASAN TERPERINCI

Area tematik	ID	Elemen transparansi	  			
			APAKAH TERSEDIA SECARA DARING?	APAKAH INFORMASI TERKINI DAN MUTAKHIR?	APAKAH MUDAH DITEMUKAN?	
 Perikanan Skala Kecil	6-A	Kapal	✓	✓	✓	Akses publik yang kuat
	6-B	Perizinan	—	—	—	Tidak berlaku
	6-C	Nelayan	⚡	✓	✓	Akses publik yang moderat
	6-D	Pembayaran	—	—	—	Tidak berlaku
	6-E	Hasil tangkapan	⚡	✓	✓	Akses publik yang moderat
	6-F	Hasil tangkapan buangan	⚡	—	—	Not produced
 Sektor Pengolahan dan Perdagangan Ikan	7-A	Impor	✓	✓	✓	Akses publik yang kuat
	7-B	Ekspor	✓	✓	✓	Akses publik yang kuat
	7-C	Pekerjaan di bidang perikanan komersial	✓	✓	✓	Akses publik yang kuat
	7-D	Pekerjaan di sektor perikanan informal	✓	✓	✓	Akses publik yang kuat
 Penegakan Hukum	8-A	Penegakan Hukum	✓	✓	✓	Akses publik yang kuat
	8-B	Sanksi atas pelanggaran berat	✓	✓	✗	Akses publik yang moderat
 Standar Ketenagakerjaan	9-A	Penegakan standar ketenagakerjaan	✗	✗	✗	Tidak ada akses publik
	9-B	Sanksi atas pelanggaran standar ketenagakerjaan	✗	✗	✗	Tidak ada akses publik
 Subsidi Perikanan	10-A	Transfer atau subsidi finansial pemerintah	✗	✗	✗	Tidak ada akses publik
 Bantuan Resmi untuk Pembangunan	11-A	Bantuan untuk pengembangan perikanan nasional	✗	✗	✗	Tidak ada akses publik
	11-B	Bantuan untuk pengembangan perikanan asing	—	—	—	Tidak berlaku
 Kepemilikan Manfaat	12-A	Dasar hukum transparansi kepemilikan manfaat	✓	✓	✓	Akses publik yang kuat
	12-B	Daftar kepemilikan manfaat	✓	✓	✓	Akses publik yang kuat
	12-C	Pengungkapan kepemilikan manfaat di bidang perikanan	—	—	—	Tidak berlaku



MEMBERIKAN MAKNA PADA TRANSPARANSI: BEBERAPA CONTOH PENTING

Kajian *TAKING STOCK* ini tidak hanya berfungsi untuk mengetahui informasi perikanan apa saja di suatu negara yang tersedia secara daring dan juga kesenjangan yang ada. Akses publik terhadap informasi perikanan juga sangat penting untuk menjawab pertanyaan penting tentang keberlanjutan sektor tersebut.

Contoh:

Siapa yang mengelola perikanan kita?

Apakah perikanan kita dikelola secara berkelanjutan?

Apa kontribusi perikanan terhadap ketahanan pangan nasional kita?

Berapa banyak pendapatan negara yang didapatkan dari sumber daya perikanan?

Siapa yang menangkap ikan kita?

Apa nilai perikanan bagi perekonomian nasional kita?

Bagaimana negara menangani penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur?

Seberapa baik pemerintah melindungi hak-hak orang yang bekerja di sektor perikanan?



Pemerintah

Pelaku perikanan

(industri dan artisanal)

Media

Anggota parlemen

Organisasi Masyarakat Sipil

Akademisi

Mengingat kompleksitas pengelolaan perikanan, tentunya tidak mudah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Namun, dengan meningkatkan akses publik terhadap informasi perikanan, pemerintah memberikan kesempatan bagi warga, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam diskusi publik.



Di Indonesia, informasi yang diberikan oleh pemerintah membantu masyarakat memahami berbagai kebijakan penting dan menjawab beberapa pertanyaan. Contohnya adalah:

✓	Apa prioritas dan target nasional dalam pengelolaan perikanan?	Kementerian Kelautan dan Perikanan menerbitkan laporan komprehensif yang menguraikan tujuan dan target terukur untuk pengelolaan perikanan. Laporan tahunannya, yang berjudul “Analisis Target Kinerja Kelautan”, memberikan data yang rinci tentang kemajuan yang telah dicapai dalam mencapai tujuan tersebut. ⁷
✓	Berapa banyak kapal penangkap ikan yang diberi izin menangkap ikan di Indonesia, dan bagaimana trennya dari waktu ke waktu?	Kementerian Perhubungan mengelola sebuah daftar kapal yang dapat diakses oleh publik. ⁸ Daftar ini berisi informasi tentang lebih dari 14.000 kapal penangkap ikan komersial. Berdasarkan data KKP tahun 2023, terdapat 1.137.734 kapal perikanan yang terdaftar, mencakup berbagai skala, mulai dari kapal nelayan kecil hingga kapal perikanan komersial skala besar. Dasbor statistik yang disediakan oleh KKP juga menyediakan data tentang jumlah kapal penangkap ikan, yang dipilah menurut jenis kapal dan provinsi. ⁹ Penyajian data ini memungkinkan perbandingan jumlah kapal dari waktu ke waktu dengan mudah.
✓	Berapa potensi peningkatan produksi ikan?	KKP memiliki data mengenai perkiraan potensi tangkapan berbagai jenis ikan di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Data ini dapat diakses dalam dasbor KKP, dan dapat digunakan untuk mengetahui apakah populasi ikan sudah dalam kondisi overexploited (diesploitasi secara berlebihan) atau belum.
✓	Bagaimana pemerintah mengatasi penangkapan ikan ilegal?	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP bertanggung jawab atas pengawasan sektor perikanan. PSDKP memiliki situs web sendiri dan menerbitkan laporan tahunan mengenai penegakan hukum, termasuk indikator kinerja dan pencapaiannya. ¹⁰ Direktorat Penanganan Pelanggaran juga menyediakan data terkait target penuntutan kasus illegal fishing. ¹¹
✓	Berapa banyak ikan yang diekspor dan diimpor?	Dasbor statistik KKP menyediakan informasi rinci mengenai ekspor dan impor produk perikanan utama, dengan data yang dapat dipecah berdasarkan provinsi dan tahun, sehingga tren historis dapat dianalisis. ¹²
✓	Berapa banyak orang yang bekerja di sektor perikanan, termasuk perempuan di sektor pasca tangkap?	Indonesia telah memberlakukan skema kartu identitas bagi mereka yang bekerja di sektor perikanan, yang disebut program KUSUKA. Data yang dikumpulkan dari penerbitan kartu identitas KUSUKA dikumpulkan dan dipublikasikan di dasbor pusat statistik. ¹³ Data ini memberikan informasi tentang jumlah nelayan dan pekerja perikanan di tingkat provinsi, termasuk informasi tentang gender. Cakupan program KUSUKA belum lengkap, tetapi terus bertambah.

7 Laporan tahunan mengenai target kinerja dapat dilihat pada website KKP pada situs: <https://portaldata.kkp.go.id/portals/publikasi/kpda>

8 Tersedia di: <https://portaldata.kemenuhub.go.id/content/dataset/10463>

9 Tersedia di: <https://portaldata.kkp.go.id/datainsight/data-kapal>

10 Laporan ini dapat diakses di: <https://kkp.go.id/unit-kerja/djpsdkp/akuntabilitas-kinerja/list/perencanaan-kinerja/all.html>

11 Tersedia di: <https://kkp.go.id/unit-kerja/djpsdkp/akuntabilitas-kinerja/list/pelaporan-kinerja/direktorat-penanganan-pelanggaran.html>

12 Data ekspor dan impor tersedia di: <https://portaldata.kkp.go.id/portals/data-statistik/exim/tbl-statis>

13 Data KUSUKA dapat diakses di: <https://portaldata.kkp.go.id/datainsight/kusuka>



Pemerintah Indonesia belum membuka beberapa informasi kepada publik, meskipun terdapat indikasi bahwa data tersebut sebenarnya tersedia. Beberapa contoh penting termasuk:¹⁴

✘	<p>Apa tujuan dan berapa nilai subsidi pemerintah yang diberikan kepada sektor perikanan di tingkat nasional dan provinsi?</p>	<p>Indonesia memberikan subsidi yang cukup besar untuk sektor perikanan, termasuk potongan harga bahan bakar untuk kapal penangkap ikan. Subsidi juga diberikan di tingkat provinsi. Namun, pemerintah tidak mempublikasikan laporan mengenai nilai subsidi yang diberikan.</p> <p>Indonesia memberikan subsidi besar bagi sektor perikanan, termasuk bahan bakar bersubsidi untuk kapal nelayan.</p>
✘	<p>Bagaimana dampak perikanan komersial terhadap lingkungan, terutama terkait volume pembuangan hasil tangkapan (discards) di laut dan konsekuensinya?</p>	<p>Informasi dari pemerintah mengenai dampak perikanan terhadap ekosistem dan keanekaragaman hayati masih terbatas. Meskipun terdapat beberapa data terkait rencana pengelolaan perikanan, dokumen tersebut tidak mencakup informasi terkait hasil tangkapan yang dibuang (discards) ataupun kematian hewan laut secara tidak sengaja.</p>
✘	<p>Bagaimana hak-hak buruh nelayan dilindungi?</p>	<p>Indonesia memiliki komitmen untuk meratifikasi Konvensi ILO tentang Pekerjaan di Sektor Perikanan (ILO 188), dan KKP bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja, Organisasi Perburuhan Internasional, dan organisasi masyarakat sipil Indonesia untuk memperkuat standar ketenagakerjaan dan penerapannya di sektor perikanan. Namun, tidak ada laporan pemerintah tentang kerentanan pekerja perikanan. Tidak ada pula laporan tentang kemajuan yang telah dicapai dalam meningkatkan upaya perlindungan di tingkat nasional dan provinsi.</p>
✘	<p>Bagaimana keputusan pengelolaan perikanan menyeimbangkan kebutuhan perikanan skala kecil dengan kebutuhan operasi skala besar, dan sejauh mana perikanan skala kecil diprioritaskan?</p>	<p>Meskipun KKP telah mengumpulkan dan mempublikasikan berbagai data di sektor perikanan, tidak terdapat pemisahan antara informasi produksi ikan mengenai hasil tangkapan yang berasal dari nelayan skala kecil dan hasil tangkapan yang dihasilkan dari nelayan skala besar.</p>
✘	<p>Donor asing mana saja yang berkontribusi terhadap pengembangan sektor perikanan Indonesia, dan apa tujuan dan hasil dari dukungan mereka?</p>	<p>Indonesia menerima dukungan signifikan dari donor internasional untuk pengembangan sektor perikanan. Namun, tidak ada publikasi pemerintah yang menyediakan informasi mengenai program bantuan yang didanai oleh donor, termasuk laporan mengenai hasil atau dampaknya.</p>

¹⁴ Terdapat kemungkinan bahwa informasi ini dipublikasikan oleh pemerintah secara daring, tetapi kajian ini tidak berhasil menemukannya karena terdapat tantangan dalam menggunakan fitur 'mencari' (find) di situs web pemerintah.

PENELUSURAN LEBIH MENGENAI AKSES INFORMASI PERIKANAN

Republik Indonesia



Penting untuk juga memahami apakah informasi yang dipublikasikan memenuhi persyaratan informasi dasar, mutakhir, dan mudah ditemukan.

Apakah informasi tersedia secara daring?



Apakah informasi mutakhir?



Apakah informasi mudah ditemukan?



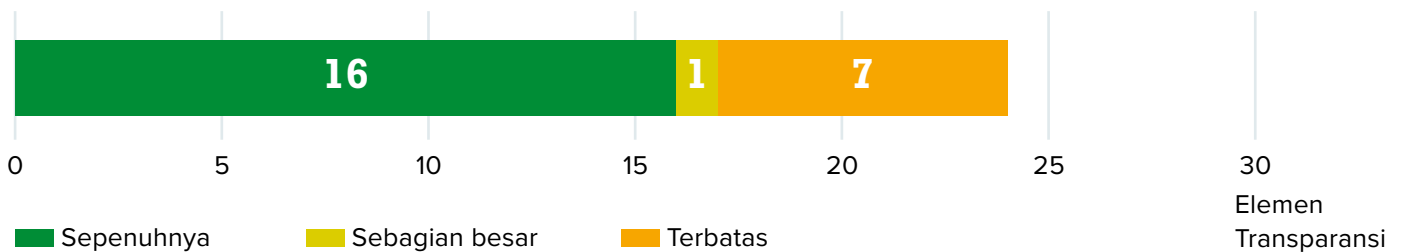
APAKAH TERSEDIA SECARA DARING?

Apakah informasi tersedia secara daring?



Pemerintah Indonesia menyediakan informasi secara daring untuk 24 elemen transparansi (atau disebut sebagai 'Akses Publik').¹⁵ Dari jumlah tersebut, lebih dari setengahnya (75%) telah memenuhi standar informasi yang ditetapkan oleh FiTI.

Apakah informasi sesuai dengan Standar FiTI tersedia secara daring?



Pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab atas pengelolaan perikanan, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), mengumpulkan dan mempublikasikan banyak informasi terkait sektor perikanan. Informasi ini umumnya tertata dengan baik di laman web utama KKP, sehingga mudah diakses dan ditemukan.

Statistik sektor perikanan yang lebih rinci diterbitkan setiap dua tahun dalam laporan utama "Kelautan dan Perikanan dalam Angka". Data ini juga tersedia dalam bentuk dasbor statistik yang dapat dicari.¹⁶ Melalui dasbor ini, pengguna dapat mengakses berbagai informasi yang telah dikategorikan berdasarkan provinsi, seperti jumlah kapal perikanan, data tangkapan, perdagangan dan konsumsi ikan, harga ikan, serta kontribusi sektor perikanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Lebih lanjut, dasbor statistik perikanan juga memberikan ringkasan informasi mengenai hasil tangkapan pada tingkat provinsi dan perbandingannya dengan tingkat tangkapan berkelanjutan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini membantu memberikan gambaran tentang bagaimana pemerintah menilai keseimbangan antara tingkat eksploitasi ikan yang berlebihan (*overfishing*) dan pemanfaatan sumber daya yang belum optimal (*underutilisation*). Yang menarik dari tampilan data dalam dasbor ini adalah adanya penjelasan tentang cara pengumpulan data dan adanya definisi istilah-istilah yang penting pada setiap set data. Keunggulan lain dari dasbor ini adalah ketersediaan data yang dapat diunduh dalam format yang mudah diproses oleh komputer (*machine-readable format*).

¹⁵ Dari total 39 elemen transparansi, kajian ini menilai enam elemen sebagai 'Tidak berlaku' bagi sektor perikanan laut di Indonesia. Sementara itu, dua elemen dianggap sebagai 'Belum tersedia', yang berarti pemerintah belum mengumpulkan atau menyusun informasi yang diminta dalam elemen tersebut.

¹⁶ <https://statistik.kkp.go.id/home.php>

KKP juga menyediakan data ketenagakerjaan di sektor perikanan melalui program KUSUKA.

KUSUKA adalah program nasional untuk memberikan kartu dan nomor identitas kepada semua orang yang bekerja di sektor perikanan. Pengajuan kartu KUSUKA bersifat sukarela, namun kartu ini digunakan dalam penyaluran berbagai bentuk bantuan pemerintah di sektor perikanan. Informasi yang dikumpulkan melalui program KUSUKA diunggah ke dalam dasbor statistik khusus, yang menampilkan data ketenagakerjaan berdasarkan jenis pekerjaan di sektor perikanan, serta dikelompokkan berdasarkan gender, usia, dan tingkat pendidikan pekerja.

Direktorat Perizinan dan Pelayanan di bawah Kementerian Perhubungan menyediakan informasi daftar kapal berizin. Daftar ini mencakup lebih dari 14.000 kapal perikanan yang telah mendapatkan izin untuk beroperasi di perairan Indonesia.

Pendekatan transparansi dalam pengelolaan perikanan laut juga tercermin pada penggunaan dokumen perencanaan nasional dalam menetapkan tujuan dan target terukur dalam pengelolaan perikanan. KKP telah mengidentifikasi indikator keberhasilan pengelolaan perikanan dari aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Salah satu indikator inovatif yang tidak ditemukan di negara lain adalah **Nilai Tukar Nelayan (NTN)**, yaitu rasio antara biaya yang dikeluarkan oleh nelayan dan harga yang mereka terima untuk hasil tangkapannya. Indikator ini digunakan untuk memantau tingkat kesejahteraan dan keamanan pendapatan nelayan.

Perkembangan pencapaian terhadap indikator keberhasilan tersebut dilaporkan dalam berbagai publikasi, termasuk laporan tahunan KKP berjudul Analisis Indikator Kinerja Kelautan dan Perikanan. Selain itu, direktorat-direktorat dalam KKP, termasuk Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, juga menerbitkan dokumen perencanaan tahunan yang menetapkan target keberhasilan yang terukur serta laporan tahunan yang mengevaluasi capaian terhadap target tersebut. KKP juga menyediakan informasi rinci mengenai anggaran tahunan dan realisasi belanjanya.

Secara keseluruhan, KKP menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengumpulkan dan mengelola informasi terkait sektor perikanan serta mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk menyusun dan mempublikasikan data tersebut secara berkala guna memastikan keterbukaan informasi publik. Baru-baru ini, dasbor statistik informasi perikanan telah diperbarui dan kini dapat diakses melalui laman utama <https://portaldata.kkp.go.id>. Laman ini memiliki menu drop-down yang mengarahkan pengguna ke berbagai dasbor statistik dan halaman terkait lainnya. Namun, berdasarkan kajian ini, struktur penyajian informasi pada portal ini dinilai kurang mudah untuk dipahami, sehingga sulit untuk diakses. Hal ini berpotensi menyebabkan kebingungan pada pengguna yang ingin mencari data perikanan melalui portal utama dan menghambat pencarian informasi secara menyeluruh.

17 <https://perizinan.kkp.go.id/grid.php?target=aktif&doc=6&q=>

Meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah berupaya meningkatkan transparansi dalam pengelolaan perikanan, terdapat beberapa aspek informasi publik yang masih belum tersedia, di antaranya:

■ Data Hasil Tangkapan untuk Perikanan Skala Besar dan Skala Kecil

Penyajian data hasil tangkap oleh pemerintah belum menampilkan secara spesifik pemisahaan hasil tangkapan berdasarkan segmen armada perikanan. Dengan demikian, masyarakat tidak dapat memperoleh informasi yang jelas mengenai hasil tangkapan dari kapal perikanan industri berskala besar dibandingkan dengan kapal perikanan skala kecil atau tradisional. Padahal, pengelompokan data hasil tangkap berdasarkan skala usaha sangat penting untuk menilai kinerja relatif dari masing-masing subsektor serta memahami perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Penyajian data hasil tangkap untuk perikanan skala kecil juga sangat dianjurkan dalam berbagai kesepakatan internasional, termasuk dalam *Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries*.

■ Kajian Ilmiah tentang Kesehatan Populasi Ikan

Pada tahun 2016, KKP membentuk **Komisi Nasional Kajian Stok Ikan (Komnas Kajiskan)** sebagai komite independen yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk menilai kondisi sumber daya perikanan di Indonesia. Namun, data mengenai komite ini tidak dapat ditemukan secara daring dan tidak ada informasi yang tersedia di laman utama situs web KKP, termasuk akses terhadap laporan yang dihasilkan. Hasil kajian Komnas Kajiskan hanya dipublikasikan jika telah diadopsi melalui Keputusan Menteri, yang membatasi transparansi kerja komite karena hanya temuan yang disetujui pemerintah yang diumumkan ke publik. Selain itu, publikasi hasil kajian sering mengalami keterlambatan, dan dokumen yang diterbitkan dalam Keputusan Menteri hanya berisi ringkasan temuan tanpa mencantumkan metodologi maupun data yang digunakan. Peningkatan transparansi dalam proses pengambilan keputusan terkait kuota tangkapan sangat penting, terutama dalam rangka implementasi program di Indonesia.

■ Informasi tentang Subsidi Pemerintah

Indonesia memberikan berbagai bentuk subsidi pada sektor perikanan, baik di tingkat nasional maupun daerah, termasuk subsidi bahan bakar. Namun, hingga saat ini belum ada laporan pemerintah yang mencantumkan informasi mengenai nilai dari subsidi tersebut.

■ Data tentang Hasil Tangkapan Buangan (*Discards*) di Sektor Perikanan

Hingga saat ini, tidak ditemukan informasi dari pemerintah mengenai tingkat discards atau hasil tangkapan yang dibuang oleh berbagai jenis armada perikanan komersial. Kajian ini mengasumsikan bahwa informasi ini telah dikumpulkan, tetapi belum dipublikasikan secara terbuka. Padahal, keterbukaan informasi mengenai discards sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada publik mengenai dampak lingkungan dari berbagai jenis perikanan, serta mendorong reformasi kebijakan guna mengurangi tingkat pembuangan hasil tangkapan yang tidak dimanfaatkan.

■ Penerapan Standar Ketenagakerjaan di Sektor Perikanan

Hingga saat ini, pemerintah Indonesia belum meratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 (ILO C-188) tentang Konvensi Kerja dalam Penangkapan Ikan. Namun, terdapat indikasi komitmen dari Pemerintah Indonesia untuk melakukan ratifikasi di masa mendatang dan sedang bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk ILO, untuk memperkuat aturan ketenagakerjaan di sektor perikanan. Salah satunya adalah melalui kerja sama antara KKP dan Kementerian Ketenagakerjaan dalam melakukan inspeksi, yang didukung oleh program *International Labour Organization (ILO), yaitu Accelerator Lab*.

Namun, kajian ini tidak dapat menemukan informasi yang dapat diakses oleh publik mengenai strategi nasional yang berkaitan dengan standar ketenagakerjaan di sektor perikanan maupun hasil dari inspeksi yang telah dilaksanakan.

■ Bantuan Pembangunan Pemerintah (*Official Development Assistance*) di Sektor Perikanan

Indonesia menerima bantuan pembangunan pemerintah (*Official Development Assistance/ ODA*) dalam jumlah yang signifikan untuk mendukung sektor perikanan dan konservasi laut. Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui *Creditors Reporting System*, dalam beberapa tahun terakhir, terdapat 13 donor bilateral dan multilateral yang mendanai berbagai program ODA di sektor ini.

Namun, tidak terdapat informasi publik yang secara sistematis mendokumentasikan tujuan, implementasi, serta hasil dari seluruh program bantuan tersebut. Transparansi mengenai pemanfaatan dana ODA sangat krusial untuk memastikan efektivitas program, meningkatkan akuntabilitas, serta memungkinkan partisipasi aktif pemangku kepentingan dalam mendukung pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.



APAKAH INFORMASI MUTAKHIR?

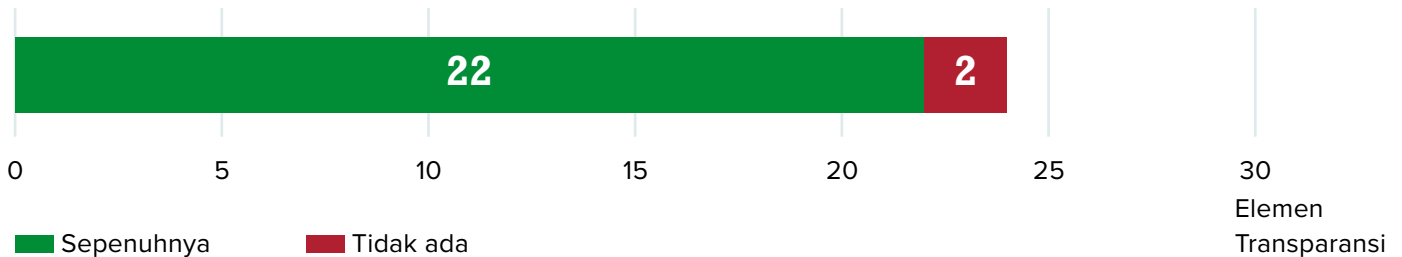
Apakah informasi mutakhir?



Informasi yang dipublikasikan secara daring oleh pemerintah Indonesia dianggap hampir sepenuhnya mutakhir, memenuhi 22 dari 24 elemen transparansi (setara dengan 92%).

Ikan merupakan sumber daya terbarukan yang, jika dikelola secara berkelanjutan, dapat tetap tersedia dan memberikan manfaat bagi generasi mendatang. Para pengambil keputusan yang mempengaruhi sektor perikanan harus memiliki akses yang cepat dan mudah terhadap data terbaru yang tersedia. Pentingnya informasi yang mutakhir menjadi semakin krusial dalam menangani isu-isu yang bersifat sangat bergantung pada waktu (*time-sensitive*), seperti produksi data tangkapan atau penilaian stok ikan secara ilmiah.

Apakah informasi yang dipublikasikan merupakan informasi yang mutakhir/terkini?



Informasi yang dipublikasikan secara daring oleh pemerintah Indonesia diperbarui secara berkala, dengan data utama tersedia tepat waktu. Berbagai bentuk data statistik, seperti angka produksi serta ekspor dan impor produk perikanan, diperbarui setiap kuartal.



APAKAH INFORMASI MUDAH DITEMUKAN?

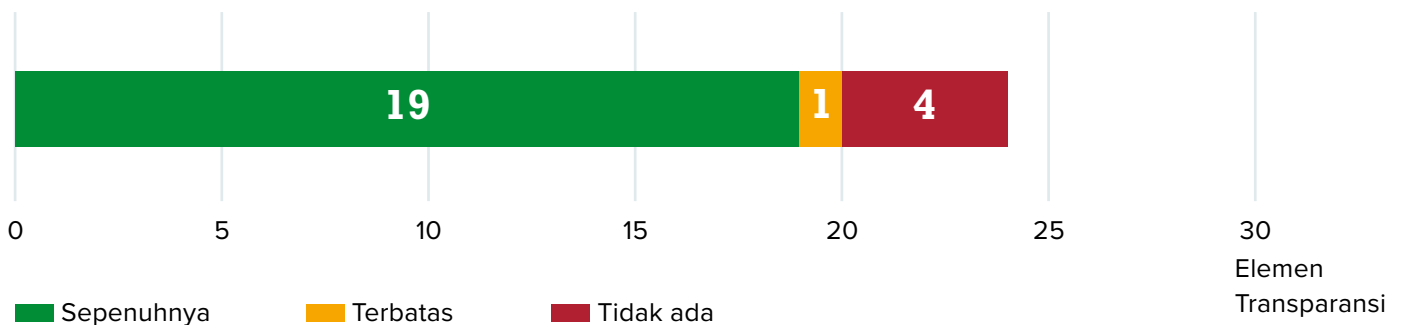
Apakah informasi mudah ditemukan?



Informasi yang dipublikasikan secara daring oleh pemerintah Indonesia umumnya mudah ditemukan. Sebanyak 19 dari 24 elemen transparansi (atau 79%) dapat diakses dengan mudah oleh publik.¹⁸

Sebagai pengelola sumber daya perikanan, pemerintah Indonesia yang berwenang di bidang pengelolaan perikanan bertanggung jawab untuk memberikan informasi terkini tentang kondisi, peluang, dan tantangan sektor ini. Di era digital, situs web menjadi sarana utama penyebaran informasi. Namun, karena sifatnya yang pasif, pengguna harus secara aktif mencari dan mengakses situs web untuk menemukan informasi yang dibutuhkan. Jika proses ini terlalu rumit atau memakan waktu, informasi penting berisiko tidak dimanfaatkan secara optimal.

Apakah Informasi Mudah Ditemukan?



Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menunjukkan komitmen yang besar terhadap transparansi dalam pengelolaan perikanan, sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mendorong keterbukaan informasi. Salah satu inisiatif utama adalah platform Satu Data, yang diluncurkan pada 2019 untuk mengintegrasikan data dan layanan pemerintah ke dalam satu platform digital.

Sejak tahun 2017, KKP merupakan salah satu dari tujuh kementerian yang menjadi kementerian percontohan dalam pengimplementasian program ini. Informasi yang dipublikasikan oleh KKP kemudian menjadi penting, dan secara umum selalu diperbarui dengan informasi yang terkini dan mutakhir. KKP menerbitkan laporan tahunan yang terperinci dengan data perikanan, serta publikasi oleh Kementerian dan sub-unitnya yang menetapkan tujuan dan target kebijakan, termasuk informasi tentang bagaimana tujuan dan target tersebut dapat dicapai.

¹⁸ Penilaian kami menganalisis seberapa mudah atau sulitnya bagi masyarakat umum untuk menemukan informasi tentang sektor perikanan laut Indonesia, bukan bagi pemangku kepentingan yang memiliki latar belakang di bidang perikanan dan oleh karena itu memiliki keunggulan unik dalam kemampuan mereka untuk menemukan informasi tersebut.

Sebagai bagian dari inisiatif Satu Data, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengembangkan dasbor statistik yang menampilkan data perikanan pada peta Indonesia, mencakup 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Dasbor ini menyediakan beragam data sosial dan ekonomi sektor perikanan yang dapat diunduh dalam format digital, memberikan sumber informasi bagi para pemangku kepentingan.

Namun, perubahan terbaru dalam struktur dasbor menyebabkan tantangan dalam mengakses, karena informasi statistik tersebar di berbagai halaman yang berbeda. Hal ini dapat menyulitkan masyarakat dalam menemukan data yang spesifik.

Secara umum, laman utama KKP telah terorganisir dengan baik dan sebagian besar informasi yang relevan dapat diakses dengan mudah. Namun, terdapat beberapa kendala dalam mengakses dokumen kebijakan nasional dan rencana pengelolaan perikanan, antara lain:

- Tidak tersedia tautan langsung ke dokumen kebijakan utama, termasuk Rencana Lima Tahun.
- Informasi mengenai kebijakan Penangkapan Ikan Terukur hanya tersedia dalam bentuk berita dan siaran pers, tanpa adanya akses langsung ke regulasi yang berlaku.
- Dokumen kebijakan harus dicari melalui basis data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), yang mengharuskan pengguna mengetahui nama spesifik dokumen yang dicari.
- Pengelolaan data dalam dasbor statistik utama masih belum optimal, sehingga aksesibilitas dan kemudahan pencarian informasi perlu ditingkatkan.

Peningkatan transparansi dan aksesibilitas terhadap informasi kebijakan dan data statistik sangat penting untuk memastikan bahwa publik dapat secara efektif memanfaatkan informasi yang tersedia untuk mendukung tata kelola perikanan yang lebih baik.



REKOMENDASI UNTUK PEMERINTAH INDONESIA

Pemerintah Indonesia, terutama yang berwenang di bidang Perikanan, yaitu KKP, telah mempublikasikan berbagai informasi penting terkait pengelolaan perikanan laut. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan perikanan di Indonesia telah sejalan dengan kebijakan nasional dalam mendorong pemerintahan yang terbuka (*open government*), serta mencerminkan kesadaran pemerintah yang berwenang di bidang pengelolaan perikanan akan pentingnya akses publik terhadap informasi guna mendukung pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.

Untuk mendukung upaya Indonesia dalam meningkatkan transparansi data terkait perikanan, laporan ini merekomendasikan empat area utama yang perlu diperbaiki lebih lanjut, yaitu:

1. Mempublikasikan Informasi Tahunan tentang Subsidi Perikanan

Hasil kajian kami mengidentifikasi kurangnya informasi publik mengenai subsidi sektor perikanan di Indonesia sebagai kejanggalan, terutama mengingat banyaknya data yang dipublikasikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Telah terdapat riset independen mengenai subsidi perikanan di Indonesia, yang mengindikasikan bahwa data mengenai subsidi perikanan Indonesia dapat dikumpulkan.

2. Meningkatkan Transparansi dalam Kinerja Komisi Nasional Penilaian Sumber Daya Ikan

Komisi Nasional Penilaian Sumber Daya Ikan (Komnas Kajiskan) merupakan kelompok multistakeholders yang memiliki peran penting dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan. Namun, informasi publik mengenai keanggotaan, aktivitas, dan hasil kajiannya masih sangat terbatas. Untuk meningkatkan transparansi, hasil penelitian dan rekomendasi dari Komnas Kajiskan perlu dipublikasikan secara berkala, terutama seiring dengan implementasi Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur di Indonesia.

3. Mengembangkan Laporan yang Terbuka secara Publik mengenai Alokasi Kuota Perikanan

Agar masyarakat dapat memahami dan mengawasi sistem penangkapan ikan berbasis kuota yang akan diimplementasikan di Indonesia, diperlukan informasi yang jelas dan terkini mengenai alokasi kuota perikanan. KKP juga perlu memastikan bahwa data terkait perdagangan dan pengalihan kuota dilaporkan serta dipublikasikan dengan baik. Informasi ini penting untuk memantau dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan Penangkapan Ikan Terukur.



4. **Mempublikasikan data produksi perikanan yang terpisah berdasarkan hasil tangkapan di setiap sub-sektor**

Salah satu kekurangan dalam publikasi data produksi ikan adalah tidak adanya pemisahan yang jelas antara tangkapan nelayan skala kecil dan perikanan industri skala besar. Jika data produksi ikan disajikan dengan lebih terperinci, hal ini dapat membantu meningkatkan pemahaman publik mengenai distribusi peluang perikanan di berbagai sektor.

5. **Meningkatkan kesadaran terhadap standar ketenagakerjaan di sektor perikanan serta upaya pemerintah dalam meratifikasi konvensi ILO 188**

Indonesia telah mengambil langkah penting dalam meningkatkan standar ketenagakerjaan di sektor perikanan dan tengah berupaya untuk meratifikasi Konvensi ILO 188. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk mempublikasikan standar ketenagakerjaan yang berlaku serta memastikan informasi ini dapat diakses oleh para pekerja di sektor perikanan. Selain itu, informasi mengenai proses ratifikasi Konvensi ILO 188 juga perlu disampaikan secara terbuka kepada publik.



TRANSPARANSI MEMBUTUHKAN KEPERCAYAAN

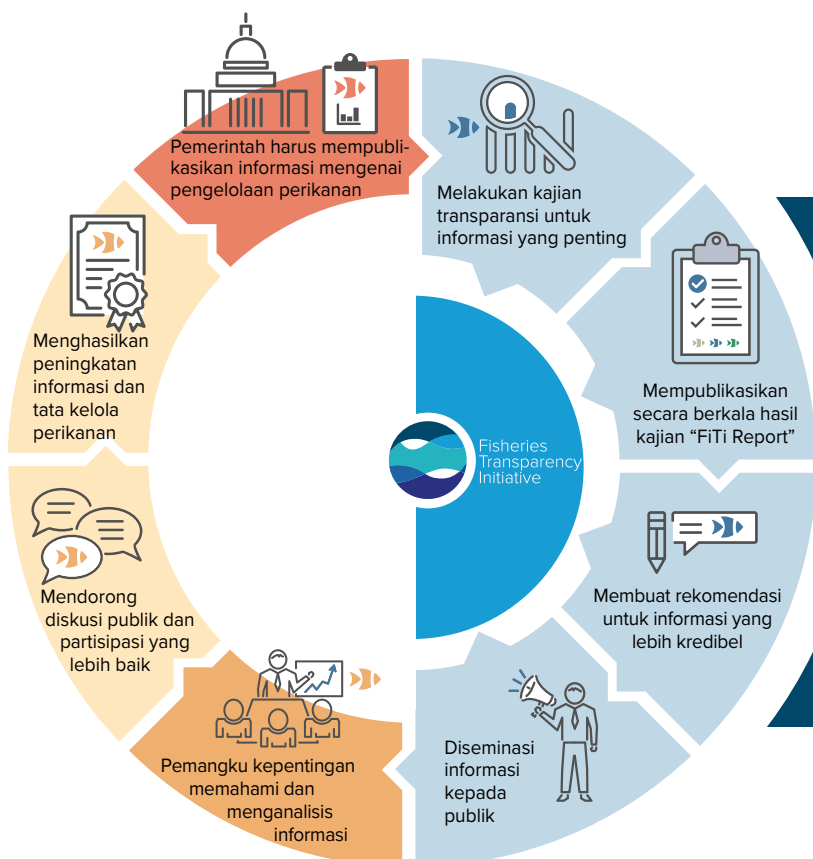
Akses publik terhadap informasi mengenai pemanfaatan sektor perikanan laut di Indonesia merupakan elemen kunci dalam tata kelola yang baik. Kajian *TAKING STOCK* ini menunjukkan adanya langkah awal yang kuat bagi pemerintah Indonesia untuk mempertahankan tingkat transparansi yang tinggi dalam pengelolaan perikanan. Namun, kajian ini tidak mencerminkan keseluruhan kondisi – masih terdapat tantangan yang tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu pihak.

Beberapa tantangan tersebut mencakup kepastian apakah informasi yang tidak dipublikasikan memang tidak tersedia atau hanya belum diunggah secara daring, serta apakah informasi yang telah dipublikasikan dianggap kredibel oleh para pemangku kepentingan. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan inklusif.

Oleh karena itu, kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci untuk mengkomodir berbagai perspektif serta meningkatkan transparansi dan kepercayaan secara konsisten.

Fisheries Transparency Initiative (FiTI) menawarkan inisiatif gabungan antara transparansi dan partisipasi. Inisiatif ini diimplementasikan di berbagai negara melalui *National Multi-Stakeholder Groups* yang terdiri dari perwakilan pemerintah, sektor bisnis, dan masyarakat sipil yang terorganisir. Kelompok ini bekerja bersama untuk:

- ▶▶ Mengevaluasi informasi yang tersedia di domain publik berdasarkan *FiTI Standard*
- ▶▶ Menyusun rekomendasi untuk menutup kesenjangan informasi yang prioritas
- ▶▶ Memberikan saran mengenai cara memperkuat publikasi informasi oleh pemerintah guna meningkatkan keterbukaan dan akses publik terhadap informasi.



Keterlibatan dalam FiTI dapat menjadi daya tarik bagi semua pemangku kepentingan yang menghargai nilai perikanan laut yang sangat besar, baik dari segi ketahanan pangan dan gizi, keanekaragaman hayati, lapangan kerja, nilai ekonomi nasional, atau budaya perikanan.

#JoinFiTI

EVALUASI PRAKTIK KETERBUKAAN INFORMASI OLEH PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENGELOLAAN PERIKANAN LAUT

Kajian TAKING STOCK ini mengevaluasi praktik keterbukaan informasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada 12 bidang pengelolaan perikanan laut,¹⁹ sebagaimana ditetapkan oleh *FiTI Standard*. Untuk memastikan mempermudah penilaian, 12 bidang tersebut telah dirinci lebih lanjut menjadi 39 elemen transparansi. Sebagai contoh, area tematik #1 'Peraturan Perundang-undangan dan Dokumen Kebijakan Resmi Perikanan' dipecah menjadi tiga elemen transparansi.

Kajian ini sepenuhnya berfokus pada ketersediaan informasi²⁰ yang disediakan oleh pemerintah Indonesia melalui situs web dan publikasi secara daring. Kajian ini, yang merupakan kajian pertama untuk Indonesia, tidak hanya bertujuan memberikan gambaran tentang informasi yang dipublikasikan pemerintah terkait berbagai aspek utama sektor perikanan laut, tetapi juga berupaya membangun landasan informasi yang kuat guna mendorong minat berbagai pemangku kepentingan, baik dari kalangan pemerintah maupun non-pemerintah.

Kajian ini tidak mencakup atau menampilkan data dasar di balik setiap elemen transparansi (misalnya, jumlah kapal perikanan), serta tidak melakukan verifikasi independen terhadap kelengkapan atau keakuratan informasi yang dipublikasikan secara daring oleh pemerintah Indonesia. Namun, jika ditemukan bukti kuat mengenai ketidakakuratan atau inkonsistensi informasi, hal tersebut juga dicatat dalam Laporan Kajian yang Lengkap (*Detailed Assessment Report*).

Dalam melakukan penilaian ini, berbagai sumber daring digunakan untuk menilai apakah informasi terkait sektor perikanan laut Indonesia tersedia secara publik melalui situs web pemerintah, termasuk:²¹

- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP): <https://kkp.go.id>
- Kementerian Perhubungan: <https://portaldata.kemenuh.go.id/content/dataset/10463>
- Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN): <https://brin.go.id/orkm/pusat-ri-set-perikanan/page/publikasi-2>

Kajian ini dilakukan sebagai studi berbasis dokumen (*desktop study*) tanpa menggunakan masukan awal atau kontribusi langsung dari pemerintah Indonesia. Proses penilaian berlangsung selama enam bulan (Juni – November 2024). Secara resmi, kajian ini dimulai pada 6 Juni 2024, saat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap di Kementerian Kelautan dan Perikanan diberi pemberitahuan mengenai pelaksanaan kajian ini, termasuk juga pemberitahuan mengenai parameter utama dan manfaat yang diharapkan dari kajian.

Temuan dan kesimpulan yang disajikan dalam laporan ini telah dibagikan kepada kementerian terkait, yang telah diberikan kesempatan untuk memberikan komentar atau masukan. Hingga tanggal publikasi, tidak ada tanggapan yang diterima.

Proses penilaian secara keseluruhan dilakukan di bawah pengawasan dan tanggung jawab Sekretariat Internasional FiTI, dengan beberapa masukan signifikan dari peneliti dan reviewer.

19 Informasi tentang perikanan darat (inland fisheries) dan budidaya tidak termasuk dalam penilaian ini.

20 Perlu dicatat bahwa dalam konteks penelitian ini, istilah '*data*' dan '*informasi*' digunakan secara bergantian. Meskipun keduanya saling berkaitan, namun terdapat perbedaan – misalnya, data adalah fakta mentah yang perlu diolah agar menjadi informasi. Namun, perbedaan ini tidak terlalu penting dalam kajian ini. which should be processed to gain information). However, this difference is not of major relevance for this assessment.

21 Informasi dianggap tersedia secara online hanya jika dipublikasikan secara proaktif di situs web pemerintah dan bisa diakses tanpa adanya batasan (misalnya tidak perlu registrasi, mengirim email ke pegawai pemerintah, atau membayar biaya tertentu).

Sebagai bagian dari kajian Taking Stock hanya terdapat beberapa elemen transparansi yang dianggap tidak dapat diimplementasikan di sektor perikanan Indonesia, yaitu:

—	Penangkapan ikan subsisten di wilayah pesisir	Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, penangkapan ikan subsisten tidak diakui sebagai kategori tersendiri. Sebaliknya, kegiatan ini diklasifikasikan di bawah sektor perikanan skala kecil yang lebih luas.
—	Perjanjian Akses Perikanan Kapal Ikan Asing	Indonesia tidak memiliki perjanjian bilateral tentang perikanan dengan negara ketiga (<i>third countries</i>)
—	Pembayaran Perizinan dari Nelayan Skala Kecil	Nelayan skala kecil dikecualikan dari kewajiban untuk membayar biaya untuk perizinan
—	Bantuan untuk pengembangan perikanan asing	Indonesia tidak memberikan dana pembangunan kepada negara ketiga (<i>third countries</i>).





Fisheries
Transparency
Initiative

TAKING STOCK

Transparansi daring tata kelola
perikanan



2024 Ringkasan
Republik Indonesia

Fisheries Transparency Initiative (FiTI)

Highway Point Building, Providence
Mahé, Seychelles

Email: info@fiti.global

Internet: fiti.global

Twitter: [@FisheriesTI](https://twitter.com/FisheriesTI)

Facebook: [Fisheries Transparency Initiative](https://www.facebook.com/FisheriesTransparencyInitiative)